

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Kajian literatur merupakan ringkasan yang berasal dari penelitian lain seperti suatu jurnal, buku, atau dokumen lainnya yang menjelaskan keadaan masa lalu dan saat ini mengenai informasi suatu topik penelitian yang sedang dilakukan.

Tulisan yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu skripsi yang berjudul “Analisis yang Mempengaruhi Harga Daging Sapi di Indonesia” yang ditulis oleh Peni Arianita Wardani. Peni Arianita Wardani adalah mahasiswa jurusan Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor 2014. Peni Arianita Wardani dalam tulisannya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga daging sapi di Indonesia.

Tulisan Peni Arianita Wardani ini membahas tema Harga Daging Sapi. Fokus utama dalam skripsi ini yakni pada harga daging sapi di Indonesia. Perbedaan skripsi Peni Arianita Wardani dengan penelitian ini terletak pada judul dan fokus analisa penelitiannya. Peni Arianita Wardani menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga daging sapi di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menganalisa lebih luas tentang kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Impor komoditas pokok Indonesia yaitu daging sapi.

Skripsi kedua yang menjadi tinjauan pustaka pada penulisan skripsi ini adalah skripsi oleh Nini Salwa Istiqomah (2014) mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi”. Fokus utama dalam skripsi ini terletak pada ekspor impor daging sapi Australia-Indonesia yang merupakan tema yang sama dengan analisa penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang impor sapi dan kebijakan pemerintah Australia dalam bidang ekspor sapi. Perbedaan skripsi Nini Salwa Istiqomah dengan penelitian ini terletak pada fokus analisa penelitiannya. Penelitian Nini Salwa Istiqomah menganalisa tentang ekspor impor daging sapi Australia-Indonesia. Sedangkan penelitian ini menganalisa tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Impor Daging Sapi Australia.

2.2. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pemikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk

pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada maka digunakan teori kerjasama internasional dan perdagangan internasional. Mengawali pemaparan dalam kerangka teoritis ini, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian mengenai hubungan internasional.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional sendiri dimulai ketika istilah 'nation' atau bangsa mulai ada. Ilmu Hubungan Internasional memakai kata atau istilah 'nation' atau bangsa, walaupun ilmu ini sebenarnya membahas tentang hubungan antar negara atau 'state' maupun non-negara atau 'non-state'. Adanya hubungan masyarakat antar bangsa yang sudah terjalin lama disebut sebagai langkah awal terciptanya hubungan internasional yang bermula dari hubungan yang primitif dan lambat laun menjadi lebih *modern*. Hubungan antar masyarakat atau negara terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan bantuan orang lain.

McClelland dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4).

Sebagai aktor terpenting didalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

1. Individu-individu
2. Kelompok-kelompok organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa serta pemerintahannya
4. Organisasi Internasional
5. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokan-pengelompokan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Coulombus & Wolfe, 1986:22).

Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu

internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan (Perwita dan Yani, 2005: 3)

Menurut T. May Rudy, dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional*, dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan yaitu;

“Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional (Rudy, 1993:3).

Dalam penelitian ini, hubungan internasional berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam sektor ekspor impor sapi yang terjadi akibat adanya MOU dan terlampir pada lampiran.

2.2.2 Ekonomi Internasional

Ekonomi Internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi, yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional (eksport dan inport) yang meliputi perdagangan, keuangan atau moneter maupun organisasi ekonomi (organisasi swasta maupun pemerintah) dan kerjasama antara negara.

Maka didalam ekonomi internasional permasalahan utama yang di hadapi umumnya sama dengan ekonomi yang lain, yaitu masalah mengenai kelangkaan barang maupun masalah pilihan barang, yang diartikan produk ialah barang maupun jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh manusia.¹

Adapun faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional salah satunya dalam perdagangan internasional, diantaranya:

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri.
2. Mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan, dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara.
3. Memiliki kemampuan berbeda dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk mengelola sumber daya.
4. Memiliki produk atau barang yang lebih dalam negri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya.

¹ Sora, N. "Pengertian Ekonomi Internasional dan Ruang Lingkupnya".
(<http://www.pengertianku.net/2015/05/pengertian-ekonomi-internasional-dan.html>)

5. Perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi.
6. Terjadinya globalisasi, karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain.
7. Mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa.
8. Adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain.

Tujuan dari ekonomi ini adalah untuk dapat mencapai atau meningkatkan kemakmuran yang lebih baik untuk manusia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan di bidang perdagangan (ekspor dan impor), perkreditan, perasuransian, investasi dan di bidang yang lainnya.

Perbedaan dalam sifat maupun cara antara perdagangan internasional dengan perdagangan didalam negeri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya:

1. Perbedaan dalam hukum peraturan mengenai jual-beli, uang, peraturan bea, dan lain-lain.
2. Perbedaan dalam adat-istiadat, kegemaran, kebiasaan, musim dan perbedaan kondisi pasar.
3. Perbedaan karena keadaan politik, sosial-budaya, ekonomi dan kultural.²

² *Ibid, hlm 14.*

2.2.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.³

Menurut Amir M.S, perdagangan internasional lebih kompleks dan rumit jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat mengakibatkan perdagangan terhambat, Contohnya, dengan adanya tarif, bea dan kuota barang impor.⁴

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah karena perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional. (Huala Adolf, 2011:3).

³ *Efiaty, Sekhah. "Perdagangan Internasional" (<https://missevi.wordpress.com/tag/perdagangan-internasional/>)*

⁴ *Ibid.*

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP). Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001:20)

Menurut Sadono Sukirno perdagangan internasional memiliki banyak manfaat diantaranya (Amir M.S., 2002:14) :

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya yaitu kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan

produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

4. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. (Huala Adolf, 2011:1)

2.2.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara- negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama Internasional ini sifatnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasip sepenanggungan, atau syarat- syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, bahkan ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut. Kerjasama

internasional juga merupakan kerja sama yang dilakukan antar negara dalam rangka bertujuan pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Kerjasama bisa meliputi semua bidang baik di bidang politik sosial kebudayaan pertahanan keamanan teknologi dan ekonomi.⁵

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.⁶

2.2.5 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh

⁵ *Saitama, William. "Pengertian Kerjasama Internasional Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya"* (<https://hidupsimpel.com/pengertian-kerja-sama-internasional/>)

⁶ *"Kerjasama Internasional"* (<https://www.suduthukum.com/2016/11/kerjasama-internasional.html>)

pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan⁷

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.⁸

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar

⁷ Muhadjir, Noeng. *“Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.”* Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

⁸ Muhadjir, Noeng. *“Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research”.* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003) p.90

dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

2.2.6 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.⁹ Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar

⁹ *Robert Jackson dan George Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89*

dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.¹⁰

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan *history* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”.¹¹

¹⁰ P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

¹¹ Prasdika, Eka. “Teori Kepentingan Nasional”. (<http://ekaprasdika.blogspot.co.id/2013/08/teori-kepentingan-nasional-national.html>)

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.¹² Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Dalam bukunya Mohtar Mas'ood menjelaskan konsep ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Hal

¹² *Ibid.*

tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.¹³ Dari demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang

¹³ Mochtar Mas'ood. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal. 34

bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.¹⁴ Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbedadengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.

Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar 'power' yang dimiliki negara tersebut. Sejalan dengan itu jika telah menemui poinnya, maka negara akan merubah alur yang tadinya hanya demi kepentingan awal namun dapat menjadi kepentingan baru. Kepentingan baru ini dilakukan dengan tetap menjalankan kepentingan awal atau betul-betul merubah kepentingannya tanpa menggunakan dasar dari kepentingan yang ingin dicapai sebelumnya. Hal ini diperjelas ketika melihat suatu

¹⁴ *Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 67-69*

negara dalam kepentingan nasionalnya dimana kepentingan A dari negara X terhadap negara Y menjadi awal dari hubungan bilateral tercipta kemudian muncul kepentingan B dari negara X yang mana dapat timbul sebelum dilakukan kerjasama ataupun selama melakukan kerjasama.

Kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan sebuah kerjasama demi memenuhi kepentingan satu, dua, tiga dan seterusnya. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai nantinya. Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional harus memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama.

Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations:

*”Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to influence each other’s actions. Bargaining is interactive, and requires an actor to take account of other actor’s interests even while pursuing its own”.*¹⁵

Dalam rana internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah ‘relation’.

2.3 Hipotesis Penelitian

“Jika kebijakan pemerintah Indonesia dapat mengurangi ketergantungan akan impor sapi dari Australia, maka peternak sapi Indonesia dapat berkembang dan meningkatkan produksi sapi dalam negeri.”

¹⁵ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. *International Relations*. Longman: New York. Hal.71

2.4 Oprasionalisasi Variabel dan Indikator

<p>Variabel Bebas :</p> <p>“Jika kebijakan pemerintah Indonesia dapat mengurangi ketergantungan akan impor sapi dari Australia</p>	<p>1. Adanya kesepakatan program kerjasama dalam bidang impor sapi Indonesia dengan Australia.</p>	<p>Kerjasama bilateral Indonesia dengan Australia menghasilkan sebuah MoU yaitu <i>Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector</i> yang ditandatangani pada tahun 2013.</p> <p>(Sumber: http://www.agriculture.gov.au/market-access-trade/indonesia-australia#programmes-of-work)</p>
--	--	--

<p>Variabel Terikat :</p> <p>“Maka Indonesia dapat meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan impor sapi 5:1 2. Adanya kebijakan UPSUS SIWAB 3. Adanya Proses Pengangkutan dan Prasarana yang Diperbaiki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan impor sapi 5:1 agar peternakan sapi dalam negeri dapat berkembang. 2. Pemerintah menjalankan kebijakan UPSUS SIWAB untuk meningkatkan percepatan peningkatan populasi ternak ruminansia besar baik sapi perah, sapi potong maupun kerbau serta untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan menggunakan daging produksi lokal. 3. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk perbaikan terhadap jalur pendistribusian,
--	--	---

		<p>menambah sarana alat angkut sapi, serta memperbaiki infrastruktur pada daerah penghasil sapi.</p>
--	--	--

2.5 Skema Kerangka Teoritis

